



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Respon ASEAN terhadap Krisis Rohingya di Myanmar**

Skripsi

Oleh

Daniel Ramos Mamimpin

2013330157

Bandung

2017



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Respon ASEAN terhadap Krisis Rohingya di Myanmar**

Skripsi

Oleh

Daniel Ramos Mamimpin

2013330157

Pembimbing

Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, M.A., Ph.D.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



### Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Daniel Ramos Mamimpin  
Nomor Pokok : 2013330157  
Judul : Respon ASEAN terhadap Krisis Rohingya di Myanmar



Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 21 Juni 2017  
Dan dinyatakan **LULUS**

#### Tim Penguji

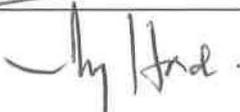
##### Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

:   
\_\_\_\_\_

##### Sekretaris

Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, M.A., Ph.D.

:   
\_\_\_\_\_

##### Anggota

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daniel Ramos Mamimpin  
NPM : 2013330157  
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Respon ASEAN terhadap Krisis Rohingya di Myanmar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 18 Juli 2017



Daniel Ramos Mamimpin

## Abstrak

Nama : Daniel Ramos Mamimpin  
NPM : 2013330157  
Judul : Respon ASEAN terhadap Krisis Rohingya di Myanmar

---

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), dalam menjalankan peranannya di Asia Tenggara sering mendapatkan hambatan. Hambatan tersebut berdampak pada kurang memadainya respon ASEAN terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Asia Tenggara. Komitmen negara anggota ASEAN dalam menjaga kemanusiaan di Asia Tenggara dipertanyakan. **Terkait hal tersebut, tulisan/skripsi ini akan membahas dan menganalisa bagaimana respon yang diberikan ASEAN terhadap krisis Rohingya di Myanmar.** Penelitian ini menggunakan teori kedaulatan rakyat dan teori non-intervensi. Teori ini dipilih karena dapat membantu penulis untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana ASEAN dalam merespon krisis Rohingya. Pada akhir penelitian, penulis menyimpulkan bahwa prinsip non intervensi yang selama ini diterapkan ASEAN terlalu rigid, sehingga perlu adanya transformasi, memberikan kelonggaran pada prinsip tersebut. Pengaturan yang lebih rinci akan penggunaan prinsip tersebut juga dinilai perlu dilakukan sehingga tidak ada penyimpangan dalam penggunaan prinsip non-intervensi.

Kata Kunci: ASEAN, Non-intervensi, Myanmar, Krisis rohingya.

*Abstract*

*Name : Daniel Ramos Mamimpin*  
*NPM : 2013330157*  
*Title : ASEAN's Responsibility to the Rohingyas Crisis in Myanmar*

---

*ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), in running its role in Southeast Asia often get obstacles. These barriers have an impact on the inadequate response of ASEAN to the humanitarian crisis that occurred in Southeast Asia. The commitment of ASEAN member countries in maintaining humanity in Southeast Asia is questionable. Related to this, this thesis will analyze how the response given from ASEAN to the Rohingya crisis in Myanmar. This study uses the theory of people's sovereignty and non-interference theory. These theories are chosen to help writers to understand and describe how ASEAN responds to the Rohingya crisis. At the end of the study, the authors conclude that the principle of non-interference that has been applied since its declaration of ASEAN is too rigid. A need for transformation in the principle loosening. A more detailed arrangement of the use of the principle is also deemed necessary so that there are no irregularities in the use of non-interference principles.*

*Keywords: ASEAN, Non-interference, Myanmar, Rohingya Crisis.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Respon ASEAN terhadap Krisis Rohingya di Myanmar.” Asia Tenggara merupakan kawasan yang terintegrasi dari beberapa negara berkembang sebagai mayoritas. Adanya krisis kemanusiaan di Myanmar menuntut ASEAN untuk memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap krisis tersebut. Akan tetapi, prinsip non-intervensi yang ada di deklarasi dan piagam ASEAN berdampak pada tidak memadainya respon yang diberikan pada krisis Rohingya di negara yang merupakan bagian dari kawasan Asia Tenggara. ASEAN yang merupakan organisasi paling bertanggung jawab mendapat banyak kecaman dari berbagai negara dan organisasi. Kemanusiaan merupakan harga mati dan tidak boleh ada toleransi apabila terjadi pelanggaran kemanusiaan. Maka dari itu ASEAN sebagai organisasi sedang diuji melalui krisis Rohingya di Myanmar.

Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah Skripsi dan sebagai salah satu syarat kelulusan program Strata-I jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, M.A., Ph.D. yang merupakan guru besar FISIP Unpar dan selaku dosen yang telah membimbing penulis dalam menyusun penelitian ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, sebagai wakil Tuhan di dunia, selaku Orangtua dari penulis, Manotar Napitupulu dan Darmawati Panggabean, penulis

menyampaikan rasa terima kasih, walaupun ucapan terima kasih tidak akan pernah bisa membalas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis. Berikutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan dan cinta kasih kepada penulis, Roy Bahren Siregar, Yulvina Napitupulu, Doli Tobing, Deciana Napitupulu, David Napitupulu, Cory Nadapdap, yang merupakan saudara kandung penulis, serta keponakan kesayangan penulis, Madelyn Siregar, Mikayla Siregar, dan Soheil Tobing.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat penulis di UNPAR, yaitu Alisa Rachmita, Kharismo, Sohuturon Fernando, Bayu Yulansyah, Maria Clara Deanty, Anastasia Fredicia, Mikky Kansa, Lola Sihombing, Marina, Joshua Manurung, Agung Perwita, Egy Tania, Bryan Nicholas, Andi Bulan, Kintan Pavitari, Nadhire Qamara, Jason Januar, Stephanie Angeline, Arya Mahakurnia, Adriel Christian, Dani Hilman, Yudha Satrio Leksono, Tatuka Trimulyono, Muhammad Fakhri, Raden Bolot Aditya, Oktorenon Sinaga, Adam Koerdi, Tara Rasasti, Monti Tambunan, Ezra Felix, Maarten Egi Taampenawas, Feisal Ramadhan, Daniel Kurniawan, Fadhil Muhammad, Bilal Makarim, Rizka Diandra, Alfrey Merizha, Martin Limbong, dan Denis Ius.

Terima kasih juga atas dukungan yang diberikan dari teman-teman himpunan Seni dan Olahraga HMPSIHI, Vania Supusepa, Aulia Dara, Firman Zahendra, Bryan Kevin Tristany, dan rekan-rekan UNPAR lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Rasa terima kasih sebesar-besarnya juga kepada sahabat-sahabat penulis dari SMA 78 Jakarta, Nisa Azzahra, Kevin Boy, Suri Adlina, Loviera Ladieska, Bagaskoro, Billi Mansyah. Serta terima kasih kepada teman-teman penulis di Jakarta dan Bandung lainnya, Karina, Dimas Triwi, James Kusnadi, Billy Muhammad, Bonifasius, Daniel AW, Rico Hasian, Gabriel Julivan, Albert Johan, Anthony Denis, dan teman-teman lain yang selalu menyemangati penulis dari sekolah hingga ke jenjang ini. Semua dukungan dan semangat yang diberikan oleh keluarga dan teman-temanlah yang mampu membuat penulis menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan penelitian ini dan membuatnya menjadi berguna di masa mendatang. Semoga tulisan ini juga dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Bandung, 14 Juli 2017

Penulis

Abstrak .....	i
<i>Abstract</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I .....	1
Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	9
1.2.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Kajian Literatur .....	11
1.5 Kerangka Pemikiran .....	16
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	18
1.7 Sistematika Pembahasan .....	19
1.8 Urutan Waktu .....	21
Bab II.....	22

Profil ASEAN .....	22
2.1 Sejarah ASEAN.....	22
2.2 Tujuan ASEAN .....	25
2.3 Prinsip ASEAN .....	27
2.4 Piagam ASEAN.....	29
2.5 Non-intervensi ASEAN.....	31
Bab III .....	32
Kaum Rohingya dan Persekusi terhadap Mereka .....	32
3.1 Fenomena Kaum Rohingya di Myanmar .....	32
3.2 Sikap Pemerintah Myanmar .....	35
3.3 Penderitaan Kaum Rohingya.....	41
3.4 Non-intervensi ASEAN sebagai Hambatan Respon ASEAN terhadap Krisis Rohingya.....	47
Bab IV .....	55
Kesimpulan .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	58

**Daftar Akronim**

ACCT	ASEAN Convention on Counter Terrorism
ACTIPI	Action for Cooperation Against Trafficking in Persons
ADB	Asian Development Bank
ASEAN	The Association of Southeast Asian Nations
HAM	Hak Asasi Manusia
IO	International Organization
NGO	Non-governmental Organization
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PM	Perdana Menteri
TIP	Trafficking in Persons
UN	United Nations

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara merupakan entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda yang saling melengkapi dan saling tergantung, bertindak bersama-sama dalam mengejar kepentingan nasional. Menurut Aristoteles, Negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan.<sup>1</sup> Dalam setiap negara ada sebuah elemen terpenting di dalamnya, yaitu masyarakat. Masyarakat dalam setiap negara pada hakikatnya terbagi - bagi ke dalam beberapa bagian, ada masyarakat yang menjadi kaum minoritas, dan ada juga yang menjadi mayoritas. Fakta ini bukan hanya terjadi di beberapa negara, melainkan terjadi di seluruh negara di dunia, maka dari itu seharusnya mayoritas dan minoritas tidak boleh menjadi masalah di dalam suatu negara. Setiap masyarakat yang ada di suatu negara memiliki kewenangan yang sama di dalam bertindak, tanpa diskriminasi, sesuai dengan isi yang terkandung pada *Universal Declaration of Human Rights* oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1984. "*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should*

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Politik*. Halaman 39.

*act towards one another in a spirit of brotherhood.*"<sup>2</sup> Pada pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* telah dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) mengacu kepada seluruh individu yang ada di dunia tanpa terkecuali. Pada pasal-pasal yang lainnya juga demikian, apabila dicermati dengan seksama, hampir seluruh pasal menggunakan kata "*everyone*" di dalamnya. Penekanan ini dapat dilihat pada hampir semua pasal yang ada. Penekanan ini berkaitan dengan kesetaraan yang menjadi fundamental di dalam deklarasi ini. Kesetaraan agar adanya keadilan terhadap setiap individu tanpa terkecuali. Hal ini berlaku di setiap benua, setiap kawasan, bahkan seluruh negara yang ada di dunia. Kesetaraan ini merupakan harga mati bagi pelaksanaan dan penegakkan HAM di dunia. Hak dasar manusia selalu melekat dalam setiap insan tanpa memandang latar belakang manusia tersebut. Konsep kebebasan tidak berkaitan dengan latar belakang manusia, namun pada pelaksanaannya seringkali kebebasan manusia dibatasi oleh latar belakang dari masing-masing individu.

Berlandaskan hal tersebut, pemerintahan di setiap negara wajib menjaga kebebasan setiap individu secara utuh. Mayoritas dan minoritas dalam berbagai latar belakang, seperti, suku, etnik, maupun agama tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang mendapatkan hak dasar yang telah diatur di Deklarasi HAM PBB. Setiap pemerintah wajib menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat yang menjadi warga negaranya. Kaum minoritas dan mayoritas di setiap negara wajib mendapatkan hak

---

<sup>2</sup> "*The Universal Declaration of Human Rights*," UN, <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> (6 Juli 2017)

asasi (hak dasar) yang sama tanpa ada pengecualian dalam pelaksanaannya, baik pengecualian terhadap kaum minoritas, maupun keuntungan bagi kaum mayoritas. Pemerintah harus bisa membedakan antara persoalan mayoritas-minoritas dengan warna kulit, suku, agama, ras, bahasa, dan tempat lahir, latar belakang ekonomi, maupun status-status lainnya yang ada di dalam diri seseorang.

Pada zaman kerajaan, sekitar masa 500 SM - 600 SM, tepatnya pada *The Proclamation of Cyrus*, kemanusiaan dan kesejahteraan manusia mulai menjadi suatu pembahasan. Pada zaman berkuasanya *Cyrus the Great*, hak asasi manusia. Cyrus pada saat itu membebaskan para budak yang sebelumnya dipaksa bekerja secara tidak manusiawi, maka itu disebut sebagai budak pada zaman kerajaan. Cyrus memberikan harapan besar untuk hidup lebih baik kepada para budak. Bahkan, pada saat itu, ia juga menyerukan bahwa semua budak yang telah dibebaskan berhak memilih agamanya tanpa ada tekanan dan diskriminasi. Sebelumnya diskriminasi, perbudakan, penyiksaan, kerja paksa, persekusi, dan tindakan melanggar kemanusiaan hal yang biasa dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang melanggar suatu hukum. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, *Declaration of France* dikenal juga sebagai *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*, dan dalam bahasa Perancis dikenal dengan *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, juga menjadi simbol penting bagi kemanusiaan global, terlebih untuk hak asasi manusia. Deklarasi Perancis diadopsi pada tahun 1789, jauh sebelum munculnya deklarasi HAM yang dikeluarkan PBB. Pada waktu itu deklarasi Perancis merupakan simbol sejarah yang mendorong terjadinya Revolusi Perancis. Terdapat 17 artikel mengenai kebebasan, yang antara lain

membahas: Kebebasan berpolitik; Kesetaraan sebelum hukum; Kebebasan beragama; Kebebasan untuk berpendapat. Pada saat itu, pengaturan tentang kebebasan memang masih sangat terbatas. Pasalnya, masih banyak kekerasan, diskriminasi, maupun persekusi terhadap kaum minoritas maupun terhadap masyarakat negara jajahan.

Fundamental konsep keamanan manusia pun memiliki 7 komponen penting, sebagai bagian dari konsep keamanan manusia, yakni *Economic security*, *Food security*, *Health security*, *Environmental security*, *Personal security*, *Community security*, dan *Political security*.<sup>3</sup>

Keamanan ekonomi (*Economic security*), sering disebut juga sebagai *poverty security*. Kemiskinan (*poverty*) merupakan hal yang sangat krusial ketika kita membahas keamanan ekonomi. Secara fisik, kemiskinan dikaitkan dengan kebutuhan hidup manusia sehari – hari, seperti rumah, aset dan pendidikan. Namun melalui konsep psikologi, kemiskinan dikaitkan dengan suara yang tidak didengar, ketidakberdayaan, ketidakadilan, manipulasi, dan eksploitasi.<sup>4</sup> Keterkaitan kemiskinan dan ketidakberdayaan sangatlah erat, terutama di *third world countries*. Pada tingkat multilateral, kemiskinan dibahas di tingkat regional dan internasional, tepatnya oleh ASEAN Foundation, Asian Development Bank (ADB), dan World Bank.

---

<sup>3</sup> Mely Caballero, *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: Understanding Non-Traditional Security*. (USA: SAGE Publications). Halaman 55

<sup>4</sup> Mely Caballero, *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: Understanding Non-Traditional Security*. (USA: SAGE Publications). *Ibid.* Halaman 83.

Senjata dalam sebuah politik negara, *food security*, bahkan dapat menjadi sebuah simbol akan kekuatan politik suatu negara. Kemampuan negara untuk memastikan seluruh warga negara untuk dapat mengakses makanan guna menjaga kesehatan dan energy setiap individu merupakan kunci utama legitimasi sebuah negara dan eksistensinya.<sup>5</sup> *Food insecurity* dapat menjadi ancaman suatu negara, hal itu terbukti di Afrika Utara dan Timur Tengah pada tahun 2008 dan 2011. Fakta berbicara bahwa ancaman terhadap individu dapat menjadi ancaman bagi negara. Kebijakan *food security* tiap negara berbeda-beda, tergantung pada tujuan dari kebijakan negara bersangkutan.

*Health Security* merupakan komponen berikutnya yang ada dalam konsep keamanan manusia. Pada konsep keamanan manusia, komponen ini menekankan bahwa kesehatan dari individu merupakan kunci utama dari *health security*. Persoalannya adalah bagaimana suatu negara dapat menjaga kesehatan setiap individu, sementara di sisi lain, populasi di setiap negara akan selalu bertambah dan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi negara untuk memenuhi apa yang menjadi *concern* utama *health security*. Pencegahan wabah penyakit merupakan masalah lain yang ada di *health security*. Kesulitan dalam pencegahan kemunculan penyakit sangat sulit untuk dilakukan. Penyakit bisa datang dari mana saja, manusia bisa datang dari mana saja, dan memungkinkan untuk membawa penyakit dan menularkan penyakit tersebut ke suatu daerah.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Halaman 115.

Komponen berikutnya, *Environmental security*, banyak perdebatan yang terjadi ketika membahas keamanan lingkungan. Kesulitan dalam menentukan bagaimana konsep keamanan lingkungan. Perubahan iklim bisa berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup, sehingga menjadi tantangan dalam keamanan lingkungan. Komponen ini banyak sekali menuai kritik karena definisi dan konsepnya yang buram atau belum jelas.<sup>6</sup>

*Personal security*, Hak asasi manusia menjadi kunci dari konsep keamanan personal. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dari setiap individu dan telah diatur dalam *Declaration of Human Rights* bahkan menjadi bagian terpenting dalam konsep keamanan manusia.

Diskriminasi dalam konsep keamanan komunitas (*Community Security*) sangat bertentangan dengan konsep awal. Jumlah konflik bersenjata di dunia yang cukup tinggi telah merubah konsep keamanan, teori dan paradigm pembangunan secara global. Sehingga, dalam konsep keamanan, kekerasan dalam komunitas tidak boleh terjadi, tetapi focus objek adalah tetap kepada individu.

*Political security* sebagai komponen terakhir dalam konsep keamanan manusia. Konsep ini juga memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia. Keterlibatan manusia terhadap politik nasional maupun internasional merupakan hal yang krusial dalam konsep keamanan politik. Proteksi terhadap individu dari intervensi militer sangat penting untuk dijaga.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Halaman 98

*Protection* dan *Empowerment* merupakan strategi dalam pengelolaan keamanan manusia. Proteksi adalah strategi menjaga individu dari berbagai ancaman keamanan manusia, sementara *empowerment* adalah strategi untuk melakukan penguatan di dalam individu. Sebagai contoh, proteksi adalah menjaga individu agar tidak berada dalam ancaman militer. Contoh *empowerment* adalah memberikan akses untuk mendapatkan makanan, sehingga individu memiliki energi untuk melakukan aktivitas secara produktif.

Suatu masalah nasional dapat berdampak terhadap situasi yang ada di domestik negara lain. Dampak tersebut bisa dirasakan oleh negara yang dekat dengan negara yang memiliki masalah, maupun negara yang secara geografis, letaknya cukup jauh. Salin keterkaitan ini dapat menyebabkan suatu masalah yang tadinya hanya berskala nasional secara otomatis berubah menjadi masalah internasional. Ketika persoalan atau masalah tersebut dikatakan hanya masalah suatu negara, maka masalah tersebut harus ditangani oleh negara bersangkutan. Akan tetapi, apabila sebuah masalah nasional telah berubah menjadi masalah bagi negara lain, maka pihak lain yang merasa dirugikan, ataupun merasa dilibatkan dalam permasalahan tersebut punya kebebasan dalam campur tangan terhadap persoalan tersebut.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Isu kemanusiaan merupakan suatu isu yang memiliki kompleksitas tinggi karena selalu berkaitan dengan kesejahteraan, keadaan sosial ekonomi, hak asasi manusia, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan kemanusiaan. Masalah

kemanusiaan merupakan masalah yang memerlukan respon yang tepat dan cepat karena masalah kemanusiaan telah diatur secara global sebagai sesuatu yang krusial bagi keberlangsungan segala aktivitas internasional. Respon tersebut diperlukan agar menjaga stabilitas suatu negara maupun regional.

Beberapa tahun terakhir, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) selalu menjadi organisasi yang dinilai penuh dengan retorika. Prinsip yang ada di ASEAN selalu menjadi perdebatan antarnegara di seluruh kawasan karena dinilai menghambat ASEAN dalam mencapai setiap *goal* yang ASEAN telah dicanangkan. Fenomena ini menjadi tantangan bagi ASEAN, bagaimana ASEAN bisa berkembang terutama dalam isu kemanusiaan.

Dalam perkembangan ASEAN sebagai organisasi di Asia Tenggara, ASEAN mendapatkan tantangan dan masalah. Masalah tersebut adalah krisis Rohingya di Myanmar. Krisis Rohingya adalah krisis kemanusiaan dan menuai banyak kecaman dari berbagai belahan dunia. Tidak satu negara pun yang membenarkan tindakan pemerintah Myanmar terhadap kaum Rohingya di Myanmar. Diskriminasi dan persekusi merupakan masalah kemanusiaan yang serius dan mengganggu keamanan manusia di kawasan tersebut. Krisis Rohingya di Myanmar merupakan isu keamanan manusia yang serius dan perlu menjadi perhatian bagi setiap negara di dunia, terutama negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. *Food security, health security, political security, economic security, environmental* merupakan komponen penting ketika membicarakan isu kemanusiaan. Diskriminasi dan persekusi terhadap kaum Rohingya melanggar semua komponen keamanan manusia yang seharusnya terjaga. Ketika

terusiknya komponen-komponen tersebut, maka itu juga sekaligus menjadi tanda bahwa terjadinya pelanggaran HAM.

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Krisis Rohingya merupakan masalah berkepanjangan dan telah terjadi sejak sekitar tahun 1940, maka akan sulit untuk tidak membahas mengenai sejarah krisis Rohingya di Myanmar. Maka dari itu, pembahasan akan dibahas dalam jangka waktu tertentu (periodisasi). Sekilas mengenai sejarah krisis Kaum Rohingya, berlanjut pembahasan dari tahun 2011 ditandai sebagai peristiwa memanasnya keadaan di Myanmar. 2011-2016 merupakan periodisasi waktu yang ditentukan penulis. Peristiwa di Myanmar dinilai memiliki cerita yang cukup dinamis dari tahun 2011-2016. Pada rentang tahun tersebut peristiwa kaum Rohingya di Myanmar cukup bergejolak dan tidak dapat dipisahkan, karena dari tahun ke tahun permasalahan berkesinambungan dan berhubungan.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Walaupun krisis Rohingya telah terjadi sejak zaman penjajahan di Myanmar, krisis ini perlu mendapat perhatian dan respon dari ASEAN sebagai organ utama yang ada di Asia Tenggara serta mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, *research question* dari penulis adalah, ***“Mengapa ASEAN tidak berhasil memberikan respon yang memadai terhadap krisis Rohingya di Myanmar”***.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan konsep masyarakat sebagai mayoritas dan sebagai minoritas yang seharusnya, penjelasan mengenai organisasi ASEAN sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Asia Tenggara, seperti krisis Rohingya. Menggambarkan dan menginformasikan hambatan-hambatan yang dimiliki ASEAN sebagai organ utama di Asia Tenggara, solusi yang akan diterapkan sebagai respon terhadap ancaman atau masalah kemanusiaan, serta dampak dari implementasi solusi tersebut terhadap isu kemanusiaan di Asia Tenggara.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Proses pembuatan penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan penulis terhadap topik pembahasan, terutama tentang ASEAN dalam menangani isu kemanusiaan di Asia Tenggara. Diharapkan, penelitian ini mampu menjadi referensi dalam kajian di kawasan Asia Tenggara, karena isi dari penelitian yang informatif dan kritis bagi para peminat studi hubungan internasional, terutama studi kawasan Asia Tenggara. Terlebih, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung terhadap kemajuan di Asia Tenggara, tepatnya organ penting ASEAN, secara spesifik dalam memberikan respon terhadap bencana alam yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

#### 1.4 Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jurnal yang digunakan sebagai pendukung penelitian terkait. Jurnal berkaitan dengan topik penelitian dan digunakan sebagai referensi terhadap pemahaman konsep ASEAN secara general dan pemahaman akan keamanan manusia di Asia Tenggara sehingga dapat diketahui apa saja yang dapat menjadi ancaman kemanusiaan. Selain sebagai referensi terkait penelitian, jurnal ini juga bersifat informatif, tidak terbatas dengan judul penelitian sehingga informasi diluar pembahasan penelitian bisa juga didapatkan.

*‘The Utility of Human Security’: Which Humans? What Security? (Alex J. Bellamy & Matt McDonald - School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Brisbane, Australia, 2002)*

Perkembangan keamanan manusia secara global telah terjadi sampai sekarang. Pergeseran yang terjadi dari melihat keamanan negara menjadi keamanan manusia. Artikel ini menyatakan bahwa konsep keamanan berubah karena krisis kepercayaan terhadap negara pasca perang dingin, hal ini merupakan penyebab utama. Kepercayaan seluruh aktor pada konsep keamanan nasional turun secara drastic karena kegagalan negara – negara menjaga keamanan nasionalnya. Pada intinya, keamanan nasional adalah soal menjaga setiap individu. Konsep keamanan manusia pada awal dibentuknya sangat dipandang sempit, namun seiring dengan berjalannya waktu, pemikir – pemikir konsep keamanan mampu mengembangkan konsep keamanan manusia menjadi sesuatu yang memiliki kompleksitas cukup tinggi. Konsep keamanan

manusia tidak mengenal latar belakang individu, menjaga setiap individu tanpa terkecuali. Menjaga individu dalam memastikan hak asasi manusia tidak ada yang direnggut, jauh dari masalah – masalah sosial, dan masih banyak lagi yang menjadi masalah keamanan manusia.

***The Top 12 Emerging Human Security Issues of the Next Decade (Charli Carpenter – Duck of Minerva, 2010)***

Pada konsep keamanan manusia, NGOs, IOs, departemen – departemen domestik, dan juga lembaga lainnya merupakan aktor yang mengelola keamanan manusia, pada area pembangunan manusia, hak asasi manusia, urusan kemanusiaan, pencegahan konflik, dan keamanan lingkungan. Beberapa hal ini telah menjadi fokus belakangan ini, namun ternyata berdampak pada ancaman-ancaman yang baru muncul 10 tahun terakhir. Artikel jurnal ini pada intinya mengangkat tentang isu-isu yang akan menjadi tantangan bagi perkembangan konsep keamanan manusia beberapa tahun kemudian. 12 hal yang dikemukakan dibawah ini dinilai membutuhkan perhatian lebih.

Masalah yang pertama adalah perawatan kedokteran mata di negara berkembang, perawatan ini merupakan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas kehidupan individu di negara berkembang.<sup>7</sup> Berikutnya, kelompok kriminal atau kartel yang menjadi ancaman, aktivitas yang dilakukan kelompok ini memiliki *influence* dalam aktivitas perekonomian negara, sehingga kelompok – kelompok ini

---

<sup>7</sup> Diakses melalui <http://duckofminerva.com/2010/01/top-10-emerging-human-security-issues.html> pada tanggal 2 Oktober 2016

seakan dipelihara oleh pemerintah. Yang ketiga, hak tanah secara adat. Masalah adat ini seringkali dipinggirkan dalam pelaksanaan pengelolaan keamanan manusia. Suara masyarakat adat seringkali terpinggirkan dalam jaringan keamanan manusia. Lalu, *space security*, diprediksi akan ada korelasi yang lebih diantara konsep keamanan manusia dengan *outer space* beberapa tahun yang akan datang. Kelima, peran diaspora dalam pencegahan konflik.<sup>8</sup> Kemudian, hak pekerja dalam berorganisasi, sangat sedikit perusahaan atau lembaga yang memperhatikan kebebasan pekerja dalam berorganisasi. Menjamin hak pekerja dalam berorganisasi adalah kewajiban, sehingga hal ini dinilai krusial dalam artikel ini. Tata kelola limbah merupakan isu ketujuh yang diangkat dalam jurnal ini. Pengelolaan limbah yang tidak terorganisir dapat berdampak negatif bagi keberlangsungan lingkungan karena akan berkaitan dengan kesehatan manusia. Tata kelola limbah diprediksi akan menjadi agenda penting dalam beberapa tahun ke depan. Berikutnya, penganiayaan berorientasi seksual dianggap sebagai masalah serius dalam keamanan manusia. Kaum *gay*, *lesbian*, dan *transgender* mengalami diskriminasi di lingkungan masyarakat, contohnya banyak terjadi di Afrika. Organisasi hak asasi manusia di dunia pun mulai menganggap serius masalah pelecehan seksual, akan tetapi keseriusan dari pemerintah, organisasi, dan semua lembaga – lembaga terkait perlu ditingkatkan karena jika tidak masalah diskriminasi seksual dan pelecehan seksual akan berbahaya bagi keberlangsungan pengelolaan keamanan manusia. Isu *water*, dimaksud adalah akses untuk mendapat air bersih. Isu ini merupakan isu yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

serius dan berpengaruh besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Di berbagai negara dunia ketiga, isu akses air bersih merupakan masalah besar karena keadaan yang buruk akan hal tersebut. Akses yang sulit dilalui masyarakat untuk mendapat air bersih menjadi indikator kegagalan isu ini di berbagai negara. Dampak lainnya mengarah pada sektor kesehatan, air kotor mengandung banyak bakteri dan berisiko untuk menimbulkan berbagai penyakit. Intinya, isu air bersih ini harus segera diperhatikan oleh setiap negara karena itu merupakan hak setiap warga negara. Masalah berikutnya adalah pembangunan dinasti pada pemerintahan. Terjadi di berbagai negara, dinasti keluarga pada sudut pemerintahan bisa berdampak buruk terhadap keadaan politik dan hukum negara bersangkutan. Praktik korupsi merupakan risiko yang sering terjadi akibat adanya sebuah dinasti keluarga dalam tatanan pemerintahan. Perhatian akan hak dalam memberikan suara secara internasional masih menjadi masalah global. Komunitas – komunitas internasional seringkali membicarakan soal demokrasi, tapi tidak memberikan institusi yang transparan dan akuntabel. Terakhir, impunitas kematian yang diabaikan.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, 12 isu diatas telah menjadi masalah yang krusial dalam pelaksanaan keamanan manusia secara global, walaupun memang pada kenyataannya, tantangan dalam pelaksaan pengelolaan keamanan manusia masing – masing negara berbeda. Respon yang tepat dan cepat atas permasalahan keaman manusia perlu dilakukan guna meminimalisir dampak yang terjadi akibat masalah – masalah keamanan manusia ini.

*ASEAN and Human Security: Challenges and Opportunities (Otto von Feigenblatt, M.A. - Nova Southeastern University, 2009)*

ASEAN merupakan suatu organisasi kawasan yang berpengaruh banyak pada dunia. Beberapa negara cukup besar seperti Kanada, Australia, dan Jepang telah mengadopsi konsep keamanan manusia. Fakta ini berdampak baik bagi perkembangan konsep keamanan manusia. Konsep keamanan ini berkembang secara cepat dan terlihat di kawasan Asia Pasifik. Diadopsi oleh hampir seluruh NGO di Asia Tenggara dan beberapa negara di Asia Tenggara, menjadi penting apabila konsep keamanan manusia kemudian diintegrasikan dengan konsep “*ASEAN Way*”. Setelah dianalisa, kedua konsep ini ternyata memiliki kesamaan karakteristik. prinsip-prinsip yang paling penting dari ASEAN terhubung ke “*ASEAN Way*” adalah menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan nasional identitas semua negara Anggota ASEAN non-intervensi dalam urusan internal negara anggota ASEAN; menghormati hak setiap negara anggota untuk memimpin eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi dan paksaan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa ASEAN dibentuk tidak dimaksudkan untuk menjadi badan seperti EU (*European Union*) karena prinsip yang dianut, kedaulatan terletak di jantung “*ASEAN Way*”. Kedua konsep ini, *ASEAN Way* dan keamanan manusia merupakan fenomena yang ada di kawasan Asia Tenggara. Konsep keamanan manusia Jepang merupakan refleksi bayangan yang seharusnya berada di kawasan Asia Tenggara, dan dinilai paling cocok untuk diimplementasikan di Asia Tenggara dengan mempertimbangkan “*ASEAN Way*”

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Teori merupakan instrumen penting dalam kajian ilmu HI yang bersifat dinamis, teori merupakan sekumpulan ide atau pemikiran dari para pendahulu yang seringkali dijadikan acuan untuk perkembangan literatur dan landasan pemikiran agar penelitian ini memiliki arah yang jelas. Teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, dan teori non-intervensi merupakan dua fundamental yang akan digunakan untuk penelitian ini. Dua teori besar ini diharapkan mampu memiliki pengaruh besar dalam penelitian ini agar penelitian mampu dibahas secara mendalam dan dinilai cocok untuk dipilih karena dapat menjelaskan fenomena yang terjadi sesuai bahasan skripsi.

Teori kedaulatan rakyat merupakan teori dasar tentang konsep negara. John Locke merupakan tokoh besar dibalik berkembangnya teori kedaulatan rakyat. Menurut John Locke, terdapat 2 asas di dalam konsep kedaulatan rakyat, asas *pactum unionis* dan *pactum subjectionis*. Asas *pactum unionis* adalah perjanjian antarindividu untuk membentuk negara, sedangkan asas *pactum subjectionis* adalah perjanjian antara individu dan negara yang dibentuk. Teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menyatakan bahwa pemerintahan dibentuk oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>9</sup> Rakyat dalam teori ini merupakan pemegang kunci dari kekuasaan. Konsep dari teori kedaulatan rakyat secara eksplisit dapat menjelaskan tentang bahasan skripsi, terutama

---

<sup>9</sup> "Sovereignty," MerriamWebster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/popular%20sovereignty> pada tanggal 6 Juli 2017

dalam menjelaskan tentang kaum Rohingya di Myanmar. Dalam teori ini, rakyat adalah inti dari kedaulatan sebuah pemerintah. Maka dari itu pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi kesejahteraan rakyat, baik dalam pemenuhan kebutuhan dalam sektor ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan, dan segala sektor yang menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan manusia. Jika sebuah negara gagal memenuhi kebutuhan rakyatnya, maka negara dapat dipastikan melakukan sebuah pelanggaran kemanusiaan.

Teori berikutnya yang dipakai adalah teori kedaulatan negara yang berkaitan dengan kedaulatan yang dimiliki suatu negara secara mutlak. Kedaulatan setiap negara ialah mutlak sifatnya dan secara otomatis dimiliki oleh tiap negara yang telah merdeka dan mendapatkan pengakuan dari negara lain, pengakuan yang harus didapay ialah pengakuan secara *de facto* dan *de jure*. Menurut teori ini adanya negara merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi terdapat pada pemimpin negara. Kodrat alam merupakan sumber kedaulatan. Penerapan hukum mengikat disebabkan karena dikehendaki oleh negara yang menurut kodrat memiliki kekuasaan mutlak. Tokoh teori ini adalah Paul Laband dan George Jellinek.

Menurut J.L. Holzgreffe, intervensi kemanusiaan adalah ancaman atau penggunaan kekerasan oleh suatu negara (atau kelompok negara) yang bertujuan untuk mencegah atau mengakhiri pelanggaran yang luas dan berat dari hak asasi manusia dari individu-individu warga negara lain, tanpa izin dari negara bersangkutan melewati

batas negara.<sup>10</sup> Prinsip intervensi sudah secara otomatis ada di dalam setiap negara merdeka dan berdaulat. Hal tersebut telah diatur pada piagam PBB bahwa setiap negara yang telah merdeka tidak boleh diintervensi oleh negara lainnya. Teori non-intervensi atau teori intervensi berkaitan bagi kedaulatan sebuah negara. Maka dari itu, teori ini dapat memberikan sebuah fundamental bagi analisis yang akan dilakukan. Memberikan pengertian dasar bahwa setiap negara yang telah diakui sebagai negara berdaulat oleh PBB memiliki kedaulatan penuh dan tidak ada yang dapat mengintervensi negara bersangkutan.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Penelitian ini akan dibuat berdasarkan data yang valid, sumber data pun akan dicantumkan sehingga kebenaran data dapat diuji. Isu dan fenomena yang dinamis membuat penelitian ini menggunakan metode kualitatif.<sup>11</sup> Penggunaan analisis penulis dalam penelitian ini pun menjadi sebuah metode yang dipakai dalam penelitian ini

---

<sup>10</sup> Holzgrefe, J. L. dan Robert O. Keohaneeds, 2003, *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. New York;Cambridge University Press. hal.18

<sup>11</sup>John W. Creswell, 2003, "*Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions*", California: Sage Publications, Inc., halaman 15.

karena penulis cukup menguasai teori dan data terkait penelitian ini, sehingga analisis penulis dapat dipercaya.<sup>12</sup>

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode yang valid, menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Dalam melakukan studi pustaka, penulis melakukan pengumpulan dan pemilihan secara selektif. Penulis juga memperhatikan relevansi data – data yang telah dikumpulkan terkait topik penelitian.

Data dan referensi yang dilampirkan dalam penelitian didapat dari buku, internet, dokumen resmi, jurnal, dan dokumen lainnya yang telah dipastikan validitasnya.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Pembahasan yang jelas akan membantu dalam mengerti konten penelitian, sehingga dalam skripsi ini, pembahasan akan dibahas secara sistematis. Berikut adalah pembagian penelitian agar pembaca mengetahui pembahasan yang akan dibahas:

### **a. Bab I : Pendahuluan**

Bab I akan memberikan pemahaman dasar dari penelitian ini, merupakan bagian terawal dari skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah yang di dalamnya terdapat pembatasan dan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 23.

perumusan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan sebagai akhir dari pembahasan yang ada di bab pertama ini.

**b. Bab II :**

Bab II akan mendeskripsikan tentang profil ASEAN yang terdiri dari sejarah ASEAN, tujuan ASEAN, prinsip ASEAN, piagam ASEAN, serta prinsip non-intervensi ASEAN.

**c. Bab III :**

Bab III merupakan bab analisis, yang akan membahas mengenai krisis Rohingya yang terjadi di Myanmar, Fenomena yang terjadi di Myanmar, sikap pemerintah myanmar terhadap kaum Rohingya, serta pembahasan bagaimana ASEAN merespon krisis Rohingya, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi ASEAN dalam merespon krisis tersebut.

**d. Bab IV :**

Bab IV merupakan kesimpulan dari skripsi, akan mendeskripsikan bagaimana ASEAN dalam merespon dan memberi solusi terhadap masalah regional, dalam hal ini adalah dalam merespon krisis rohingya di Myanmar, serta bagaimana hambatan di dalam ASEAN yang berdampak pada terbatasnya respon yang diberikan oleh ASEAN.

**1.8 Urutan Waktu**

	<b>DES</b>	<b>JAN</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>APR</b>	<b>MEI</b>	<b>JUN</b>
<b>Revisi</b>							
<b>BAB I</b>							
<b>BAB II</b>							
<b>BAB III</b>							
<b>BAB IV</b>							